

PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS SENSITIVITAS GENDER DALAM PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN INDIA

Vina Salviana D. Soedarwo¹, Nurul Zuriah², Gonda Yumitro³, Gautam Kumar Jha⁴

¹ Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

² Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

⁴ Centre for Chinese and Southeast Asian Studies, School of Languages, Literature and Culture Studies Jawaharlal Nehru University New Delhi, India

¹ Email : vinasalvianaumm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pendidikan politik tentang isu-isu sensitivitas gender di Indonesia dan India, yang dilakukan oleh partai-partai politik dengan metode komparasi. Kekhasan metode komparasi adalah dipilihnya kasus yang selektif dan masalah yang kritis. Ada tiga partai politik di Indonesia dan tiga partai politik di India menjadi subyek. Keenam partai politik di Indonesia dan India telah melakukan pendidikan politik dengan masing-masing model dan lebih jauh menggambarkan proses rekrutmen kader yang tipikal untuk kader laki-laki dan perempuan berdasarkan ideologi masing-masing partai. Ini berarti bahwa baik di Indonesia maupun di India, pendidikan politik di antara partai politik masih kurang sensitif gender. Implikasinya, partai politik memerlukan model pendidikan politik berdasarkan sensitivitas gender.

Kata kunci : Pendidikan politik, Sensitivitas gender, Partai politik.

POLITICAL EDUCATION BASED ON GENDER SENSITIVITY AMONG POLITICAL PARTIES IN INDONESIA AND INDIA

Abstract

This research is aimed to elaborate political education concerning the issues of gender sensitivity in Indonesia and India, conducted by political parties by using comparative study. The specificity of this study is the selection of selected cases and critical problems. There are three political parties in Indonesia and three political parties in India become the subjects. Those six political parties in Indonesia and India have been conducting political education with each model and further describe the process of cadre recruitment which is typical both for the cadre of men and women based on the ideology of each party. It means that both in Indonesia and in India, the political education among political party still lack gender sensitivity. The implication, political party is needed a political education model based on gender sensitivity.

Keywords : Dispute of public information, Public authority, Public participation.

PENDAHULUAN

Jumlah perempuan lebih dari setengah populasi dunia. Kontribusi perempuan dalam pembangunan bidang sosial ekonomi masyarakat juga lebih dari setengah dibandingkan jumlah laki-laki di dalam kegiatan produksi dan reproduksi. Ironisnya, partisipasi mereka dalam proses dan struktur politik untuk terlibat dalam keputusan tentang penggunaan sumberdaya masyarakat tetap tidak signifikan. Kondisi saat ini, perwakilan perempuan di badan legislatif tidak lebih dari 30 persen.

Kekuatan perempuan sangat penting dalam negara manapun bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawah kuota 30 persen dan di bawah rata-rata dunia. Rata-rata dunia sebesar 23,6 persen perempuan yang menduduki kursi di parlemen (Gerintya, 2017) Mengapa demikian?

Di Indonesia, budaya patriarki menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik ataupun pemerintahan mengingat urusan politik dianggap “keras” dan tidak pantas untuk perempuan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan sebenarnya kian responsif gender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi saja (Nurchahyo, 2016).

Hal ini membuahakan gambaran representasi perempuan di parlemen Indonesia sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kursi di Parlemen	Jumlah Anggota Perempuan	%
1999	500	44	8,8
2004	550	65	11,82
2009	560	100	17,86
2014	560	87	17,32

Tabel 1. Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia (DPR-RI) Pasca Reformasi

Sumber: KPU (Publikasi Statistik Indonesia, 2015)

Dari tabel 1. tersebut perempuan hanya dijadikan pelengkap saja, jumlah perempuan yang duduk di parlemen tidak memenuhi kuota

30 persen mereka berangkat dari partai politik tanpa diberi bekal pengetahuan yang memadai untuk siap menjadi wakil rakyat di parlemen, sehingga pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kemerosotan, hal ini dampak dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan perempuan dalam parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan secara signifikan (Ardiansa, 2017).

Naik dan turunnya jumlah keterwakilan perempuan di dalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, hal ini digambarkan oleh hasil studi Priandi, dan Roisah (2019) yang gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditopang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kebijakan yang sama pada baik pemilu 2009 maupun pemilu 2014. Kekhawatiran presentasi perempuan akan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 % perempuan masuk ke dalam daftar pencalonan legislatif di pemilihan umum 2019.

Hal ini selaras dengan temuan Hadiyono bahwa pencapaian perempuan di dalam parlemen tidak serta merta diikuti dengan kinerja yang maksimal sehingga perjuangan untuk pemenuhan hak-hak yang diajukan oleh partai-partai politik tidak mengutamakan kualitas ataupun profesionalitas, tetapi malah lebih mengedepankan popularitas calon anggota legislatif perempuan yang biasa diambil dari artis atau hubungan keluarga dari para ketua parpol dan kaum pragmatis, yang terpenting adalah pencapaian kuota 30% dan parpol lolos dalam verifikasi agar dapat ikut menjadi peserta pemilu (Hadiyono, 2015)

Masalah ini menjadi untuk dicari solusinya, mengingat Indonesia saat ini sedang mengembangkan demokrasi sehingga keterlibatan perempuan dalam ranah politik harus ditingkatkan, dan sensitivitas gender juga harus dimiliki oleh politisi perempuan maupun laki-laki. Jika politisi dapat memiliki sensitivitas gender maka hal itu dapat memberikan dampak

pada kebijakan program pembangunan yang lebih berbasis sensitivitas gender.

Rupanya di India sebagai negara demokratis yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dan yang memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari Indonesia dan pernah memiliki pemimpin perempuan ternyata memiliki gambaran yang sama dengan Indonesia berkaitan dengan masalah kesetaraan gender. Perempuan India masih hidup sebagai kelompok yang termarginalisasi Perempuan masih dianggap sebagai suatu objek yang tidak memberikan keuntungan bagi keluarga, hal ini tentu tidak selaras dengan hak-hak perempuan (Haryati, 2017). Demikian pula dengan keterlibatan perempuan dalam politik. Jumlah perempuan yang duduk di parlemen kondisinya lebih rendah dari pada di parlemen Indonesia. (Lihat Tabel 2)

Demokrasi India secara mencolok menunjukkan posisi perempuan yang relatif tidak berdaya. Dalam pemilihan Lok Sabha ke-16 pada tahun 2014, 61 kandidat perempuan menang yang hanya 11,33% dibandingkan dengan 89% perwakilan laki-laki. Perempuan juga kurang terwakili dalam berbagai majelis legislatif, dewan legislatif, dewan distrik dan otonom, dewan suku lainnya dan Gaon Panchayats dll (Choudhury, S., & Slaby, 2016).

India siap muncul sebagai negara paling maju pada tahun 2020 dengan lebih melek huruf, berpengetahuan luas dan ekonomis di garis depan. Tidak diragukan lagi perempuan akan memainkan peran penting di garis depan dalam berkontribusi pada pembangunan negara. Upaya pemerintah India untuk menambah partisipasi perempuan di dalam pemerintahan lokal India, dari tidak ada menjadi 33 % dengan menetapkan kuota untuk Lembaga pemerintahan lokal (lembaga *panchayati raj*) tentu saja menarik minat pengamat, peneliti, feminis, politisi, media dan pandangan publik secara umum. (Strulik, 2007).

Selalu ada pertanyaan, bagaimana memperbaiki status perempuan di India baik muda maupun dewasa? Semua sektor dalam masyarakat India termasyuk pelajar, akademisis, politisi, publi, sipil dan peradilan, polisi dan

juga pemerintah harus menyuarakan kesetaraan gender. Norma kesetaraan gender menjadi norma yang penting di India yang membutuhkan waktu yang panjang untuk berubah dalam sistem yang baru dan penegakan hukum, pembuat kebijakan dan para birokrat. (R. & G., 2018)

Tahun	Jumlah Kursi di Parlemen	Jumlah Anggota Perempuan	%
1999	543	48	8,8
2004	543	45	8,1
2009	543	59	10,0
2014	543	61	11,2

Tabel 2. Representasi Perempuan di Lok Sabha India dalam Empat Periode Pemilu

Sumber: : Election Commission of India, (Vijayakumari & Rao, 2014)

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan model *comparative study*, dengan pendekatan kualitatif. Studi komparasi ini berorientasi kasus yang bertujuan untuk memahami sepenuhnya satu atau beberapa kasus dan masalah kausalitas, hal ini menjadi masalah utama dalam metodologi Sosiologi.

Subjek penelitian adalah 3 partai politik di Indonesia (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Keadilan Sejahtera) dengan alasan bahwa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah partai politik yang menang dalam pemilihan umum 2014, dan Partai Golongan Karya adalah partai politik yang telah berhasil menduduki lima partai politik hebat selama orde baru dan reformasi, sementara Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik yang berbasis pada Islam. Di India juga memilih 3 partai politik yang terdiri dari dua partai nasional (Partai Bharatiya Janata dan Kongres Nasional India) dan Liga Muslim Uni India. Alasan memilih 3 partai politik di India sebagai subjek penelitian adalah bahwa *Partai Bharatiya Janata* dan *Partai Kongres Nasional* India adalah dua partai politik nasional dengan jumlah perwakilan politisi perempuan yang relatif besar, BJP 55 kandidat perempuan dari total 167 dan kandidat

Partai Kongres 52 orang (Newman, N., et al. 2019) sedangkan partai politik yang ketiga adalah Liga Muslim Uni India (*Muslim League*) dengan memilih Federasi Asosiasi Muslim India sebagai informan.

Observasi dilakukan langsung di lokasi yaitu di kantor tiga partai politik (PDIP-Partai Golkar dan PKS) di Malang Indonesia dan dua kantor partai politik (BJP dan Congress) serta kantor Federasi Asosiasi Muslim India di New Delhi-India. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan pengumpulan data karena akan menganalisis (1) tentang pendidikan politik berdasarkan sensitivitas gender di antara partai-partai politik di Indonesia dan India. (2) untuk mempelajari dampak sensitivitas gender di antara partai-partai politik di Indonesia dan India untuk setiap kader/ konstituen/komunitas mereka.

Pengumpulan data juga menggunakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan alasan filosofis, metodologis dan praktis. Karena alasan filosofis adalah FGD memberikan informasi dari banyak perspektif sehingga dapat memperkaya hasil penelitian. Sebagai alasan metodologis adalah bahwa jika dalam penelitian, informasi dapat ditemukan dalam metode lain, sehingga FGD adalah salah satu opsi sedangkan, sebagai alasan praktis adalah bahwa orang-orang yang terlibat dalam FGD bukan sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang aktif dan bebas dan merasa terlibat dalam hasil penelitian.

FGD di Indonesia dilakukan dengan melibatkan pengurus ketiga pengurus partai politik dan juga simpatisan ketiga partai politik tersebut. Di India FGD dilakukan dengan melibatkan partisan dan simpatisan ketiga partai politik.

Data yang telah disusun oleh observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan beberapa langkah seperti reduksi, tampilan, verifikasi dan kesimpulan melalui proses mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan fenomena (Huberman & Miles, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari ketiga partai politik di Indonesia dapat dideskripsikan bahwa tidak ada pendidikan politik dalam partai politik yang berdasarkan sensitivitas gender, yang ada adalah program kaderisasi, berkaitan dengan pendidikan politik secara umum hal ini melekat pada kaderisasi yang lebih bersifat ideologis.

Kondisi Pendidikan Politik dalam Tiga Parpol di Indonesia

Pendidikan Politik pada PDIP

Proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh PDIP melalui dua metode yaitu (1) metode *Indoor* yaitu proses kaderisasi yang dilakukan di dalam ruangan di mana setiap kader dilatih cara-cara memecahkan suatu masalah, memimpin rapat, seminar dan lain-lain. (2) metode *Outdoor* yaitu proses kaderisasi yang dilakukan di lapangan, proses ini melatih agar setiap kader mampu bersosialisasi dengan masyarakat, menampaikan visi dan misi partai kepada masyarakat luas, dan menjadi duta partai dalam berbagai bidang.

Pada PDIP lebih dikenal adanya program kaderisasi selain juga ada pendidikan politik. Kaderisasi yang dilakukan PDIP kota Malang melalui beberapa tahap yaitu tahap Pratama, melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kedua tahap Madya, yaitu merupakan lingkup provinsi yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan tahap yang terakhir yaitu tahap Utama, yaitu pada lingkup Dewan pimpinan Pusat (DPP). Ada beberapa istilah dalam kaderisasi dalam partai politik ini yaitu kaderisasi pada tahap awal yaitu tahap pemula berisi anak-anak muda yang memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki ideologi Pancasila sedangkan kader yang tertinggi adalah Guru Kader yaitu kader yang telah teruji dedikasinya dan merupakan tahap paling tertinggi.

Kaderisasi pada PDIP dibagi menjadi dua yaitu pertama kader bangsa dan kedua adalah kader partai. Kader bangsa adalah para kader yang duduk di kursi parlemen (legislatif) maupun yang duduk di kursi eksekutif. Kader partai adalah kader yang mempunyai kedudukan

di organisasi PDIP yang mempunyai kedudukan dalam struktur organisasi PDIP

Pendidikan Politik yang dilakukan oleh partai politik ini dengan mengadakan sekolah politik yang menghadirkan para tokoh dengan materi di antaranya adalah (a) Sosialisasi 4 pilar. (b) Pancasila. (c). NKRI. (d) UUD 1945. (e) Bhineka Tunggal Ika. Nampak bahwa pendidikan politik yang berbasis sensitivitas gender belum ada, meskipun ada bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak.

Pendidikan Politik pada Partai Golkar

Pada partai politik Golongan Karya sistem kaderisasi menggunakan sistem stelsel aktif, dimana masyarakat bertindak aktif secara *bottom up* dari tingkat RT dan RW. Adapun metodenya adalah semacam pemberian pelatihan melalui pemberian materi dan diskusi *two way traffic communications*. Pola Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa) suatu program pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk kader di daerah memposisikan Kader Penggerak Cepat (KPC) sebagai tim rekrutmen kader. Setelah diadakan rekrutmen kader, maka dibentuklah Kelompok Kader (POKKAR). Dalam rangka mewujudkan kader yang profesional Golkar memilih dua cara, yakni pembentukan Kelompok Diskusi, dan pelaksanaan *Training of Trainer (ToT)*. Hal ini termasuk proses kaderisasi dalam partai Golkar yang diserahkan kepada organisasi hasta Karya. Kader hasil *ToT* diwajibkan mengkader minimal 300 orang. Proses kaderisasi ini berbeda dengan Golkar pada waktu yang lampau yang sifatnya masih *top down* dengan pola kaderisasi Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa)..

Golkar bahkan telah memiliki model pendidikan politik sejak orde baru. Pasca reformasi ini, pendidikan politik yang dilakukan oleh Golkar disesuaikan dengan paradigma baru Golkar. Dalam perumusan paradigma baru Golkar terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap

berideologi Pancasila dan doktrin karya kekarya. Pembaruan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai Golkar yang mandiri, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif. Paradigma baru Golkar bermaksud membawa partai menjadi partai modern dalam makna yang sebenarnya, yakni tidak lagi sebagai “partainya penguasa” (*the ruler’s party*) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana pernah terjadi pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Salah seorang pimpinan Golkar menegaskan, “lahirnya paradigma baru Golkar didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai Golkar sendiri, yakni jati diri dan watak Golkar sebagai kekuatan pembaharu, sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya”.

Menurut para informan ada lima kekuatan yang dimiliki Golkar. *Pertama*, potensi historis, karena Golkar telah berusia lebih dari tiga setengah dasawarsa maka partai Golkar memiliki pengalaman panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik di bidang pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif. *Kedua*, potensi *infrastruktur* yang sangat kuat. Partai Golkar memiliki struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa/kelurahan yang telah berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. *Ketiga*, potensi sumber daya manusia yang berpengalaman, unggul dan lengkap. *Keempat*, potensi soliditas yang kuat. Hal ini terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang berkarakter. *Kelima*, potensi sebagai partai yang mengakar dan responsif di masyarakat. Partai Golkar memiliki anggota dan kader yang tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi (*merit system*).

Pada Partai Golkar, mempunyai organisasi sayap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KKPG) sesuai dengan program yang datang dari pusat melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) pemberdayaan bagi perempuan

partai GOLKAR. Hal ini sejalan dengan studi (Amirullah, 2016) yang menggambarkan bahwa diklat-diklat khusus perempuan terutama yang diselenggarakan oleh organisasi sayap KPPG lebih terfokus kepada materi pemberdayaan yang tidak terprogram, lebih tidak terjadwal dan lebih insidental dibandingkan dengan diklat-diklat gabungan dan belum ada pendidikan politik yang khusus terkait dengan sensitifitas gender.

Pendidikan Politik pada PKS

Serupa dengan dua partai politik yang terdahulu, PKS juga lebih menekankan pada kaderisasi. Kaderisasi yang dilakukan oleh PKS dimulai dengan mengajak anggota baru sesuai AD/ART dengan berbagai cara. Cara yang *pertama*, melalui pendekatan personal melalui anggota-anggota yang ada lewat perkenalan. Cara *kedua*, perekrutan terbuka melalui training Orientasi Partai, *cara ketiga*, melalui jalur kaderisasi yaitu melalui majelis taklim dan holaqoh-holaqoh pembinaan (taklim rutin partai diselenggarakan sebulan sekali).

Dalam proses kaderisasi harus mengikuti kegiatan partai yang bersifat sosial dan politik disebut *kader pemula* selama 6 bulan. Dari kader pemula ini bila ingin menjadi anggota partai harus memenuhi syarat tidak boleh merokok dan sudah harus berhijab (*jilbab*).

Dari kader pemula dapat menjadi anggota muda, biasanya anggota muda sudah diperbolehkan menjadi ketua ranting, setelah itu dapat meningkat menjadi anggota madya sebagai kader inti partai. Jenjang berikutnya adalah anggota dewasa memiliki syarat harus hafal 6 jus bacaan *Al Qur'an*. Jenjang yang lain adalah anggota ahli yaitu anggota yang telah lulus seluruh kurikulum biasanya adalah kader-kader yang ada di DPD.

Di dalam PKS terdapat Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), misinya adalah melakukan penguatan ketahanan keluarga Indonesia. BPKK merupakan sarana komunikasi dakwah perempuan PKS terkait perempuan, anak dan keluarga. Seperti halnya kedua sayap organisasi partai sebelumnya, PKS

belum melaksanakan pendidikan politik yang sensitivitas gender.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Walahe (2018) bahwa idealnya partai politik memberikan pendidikan politik kepada perempuan agar perempuan juga mendapatkan pengetahuan terkait hak-hak perempuan yang sebagaimana mestinya. Sehingga kader perempuan dapat dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam hal kepengurusan maupun di dalam pencalonan anggota legislatif itu sendiri dan yang terutama perempuan mampu bersaing dalam hal kemenangan pemilu yang setiap 5 tahun sekali diadakan di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dengan temuan yang dilakukan Haryati (2017) bahwa PKS di Jepara melaksanakan program pemberdayaan dengan pemberian pengetahuan kepada kader perempuan berkaitan dengan cara berpolitik agar mampu berkompetisi dengan kader laki-laki. Pembekalan tersebut membuat kader perempuan memiliki daya saing yang pada gilirannya dapat menempati posisi strategis baik dalam internal partai maupun lolos menjadi anggota legislatif mewakili partainya. Namun demikian, pada studi ini belum nampak adanya model pendidikan politik yang berbasis sensitivitas gender.

Dari deskripsi di atas tampak bahwa ketiga partai politik ini telah melakukan pendidikan politik dengan model masing-masing dan lebih menggambarkan proses kaderisasi yang bersifat umum baik bagi kader laki-laki maupun perempuan berbasis ideologi masing-masing partai. Meskipun PDIP memiliki Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan, PKS memiliki Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga serta Partai Golkar memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar dirasakan dampaknya belum optimal. Artinya pendidikan politik yang khusus berperspektif kesetaraan gender atau yang melibatkan isu-isu gender belum optimal dan berdampak kepada kader laki-laki.

Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan di PDIP pun belum mampu mendorong keterwakilan perempuan dengan

angka yang memadai dalam pemenuhan kuota 30 % di parlemen. Demikian pula dengan PKS walaupun Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga memiliki misi yaitu penguatan ketahanan keluarga Indonesia, penguatan paradigma ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas dan penokohan kader perempuan PKS serta optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan namun di level daerah belum dapat mendorong dan memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen, namun program pemberdayaan keluarga telah dilakukan di berbagai daerah.

Partai Golkar yang memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar misalnya memiliki *pertama*, fungsi kepartaian yaitu kegiatan yang terkait dengan manajemen partai dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya kader perempuan Partai Golkar *Kedua*, fungsi elektoral yaitu melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peran kader perempuan Partai Golkar untuk pembinaan basis massa melalui berbagai kegiatan pembangunan *Ketiga*, fungsi kebijakan adalah kegiatan yang terkait dengan telaah dan kajian kebijakan partai oleh bidang pemberdayaan perempuan di berbagai kegiatan, baik internal maupun eksternal.

Bidang ini relatif banyak program dan menunjukkan tertatanya program *Pertama*, KPPG mendorong agar kaum perempuan menguatkan kapasitas dirinya dalam berpolitik agar berpihak pada kaumnya. Dalam berpolitik, memiliki integritas dan keberpihakan kepada sesama kaumnya. *Kedua*, adalah penguatan perempuan dalam partai politik, agar lebih sensitif gender dan membuka ruang yang lebih luas bagi keterwakilan dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. *Ketiga*, penguatan kebijakan untuk kesejahteraan kaum perempuan, melalui advokasi berbagai perundang-undangan, guna menjamin aturan yang dibuat tidak akan berdampak negatif dan diskriminatif kepada kaum perempuan. *Keempat*, penguatan konstituen dan pemilih perempuan, agar menjadi pemilih cerdas dan menjadi motor untuk mendorong gerakan anti politik uang. Namun, Partai Golkar yang notabene merupakan partai

politik yang cukup tua di Indonesia belum mampu mendongkrak kuantitas keterwakilan perempuan di parlemen.

Kondisi Pendidikan Politik dalam Tiga Papol di India

Pendidikan Politik pada BJP

Dalam keberadaannya, Partai BJP Janata adalah partai politik yang dominan di India. Bahkan pada 2018, BJP adalah partai terbesar dengan perwakilan tertinggi di Parlemen India. Tiga tahun lalu, pada 2015, partai ini memiliki 100 juta anggota terdaftar. Pada saat yang sama, partai terus meningkatkan dukungan rakyat, Partai ini menikmati dukungan luas di antara anggota kelas atas dan di India utara. BJP telah mencoba untuk menarik dukungan dari kelas bawah, terutama dengan menunjuk banyak anggota kasta rendah ke posisi partai terkemuka.

Demikian pula dalam Pemilihan Umum tahun 2019, BJP masih unggul 303 kursi dari 542 kursi dan 55 diantaranya adalah perempuan, berikut gambaran kandidat perempuan yang ada di partai politik di India.

Partai	Jumlah Kandidat Perempuan	
	Tahun 2019	Tahun 2014
BJP	55	37
INC	52	59
BSP	23	27
TMC	22	25
CPI (M)	10	8
CPI	4	6
NCP	1	4

Tabel 3. Representasi Kandidat Perempuan dalam Pemilu di India Tahun 2019

(Sumber: Election Commission of India, (Newman, N., et.al, 2019))

Sebelumnya, BJP mulai memperoleh keberhasilannya dalam pemilihan tahun 1989, ketika ia mendapat manfaat dari sentimen anti-Muslim dengan menyebut pembangunan sebuah kuil Hindu di daerah *Ayodhya* yang dianggap suci oleh umat Hindu tetapi pada saat itu oleh Masjid Babri diduduki. Pada 1991, BJP meningkatkan daya tarik politiknya, memperoleh 117 kursi di Lok Sabha (majelis

rendah Parlemen India) dan mengambil alih kekuasaan di empat negara bagian.

Sistem hierarkis berhenti memiliki presiden partai sebagai tingkat tertinggi organisasi. Selain itu, eksekutif nasional adalah tingkat minimum berikutnya yang dapat hubungan langsung dengan pemimpin partai. Ini terdiri dari para pemimpin senior yang datang dari seluruh India. Orang-orang ini juga menjadi pembuat kebijakan partai, karena posisi mereka juga sangat strategis, seperti Wakil presiden, sekretaris jenderal, sekretaris dana dan wali amanat.

Di India, partisipasi perempuan lebih merupakan partisipasi yang dinominasikan, tetapi jumlahnya terbatas. Berdasarkan konstitusi, mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bersaing dalam politik. Perempuan bersaing dengan pria, tetapi mereka tidak bisa berhasil. . Sehingga, India mencalonkan perempuan, sangat penting untuk citra internasional. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah semacam partisipasi simbolis. Kekuatan pengambilan keputusan masih laki-laki. Menariknya di 19 negara bagian India, pada tingkat *panchayat*, 50% perempuan menjadi pemimpin berdasarkan reservasi.

Dalam hal pekerjaan, kisah positif menunjukkan bahwa 15 % perempuan kekurangan pekerjaan di India (dinyatakan oleh salah satu subjek). Ini menunjukkan partisipasi perempuan di tempat-tempat umum meningkat, namun, di legislatif, para perempuan tidak punya reservasi.

Perempuan harus berhasil di mana mereka harus bersaing keras melawan sesama perempuan serta bersaing dengan laki-laki. Pesaingnya bisa anggota keluarga mereka, atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Karena itu, mereka perlu bekerja keras. Selain itu, alasan-alasan ideologis masih menjadi masalah para perempuan dalam masyarakat India, karena posisi perempuan cenderung terlihat lebih rendah daripada laki-laki.

Menurut salah satu informan (subjek Penelitian) dari BJP demokrasi adalah

bagaimana menjaga kepercayaan dan iman rakyat. Apalagi itu tidak mudah. Para politisi perempuan harus bekerja keras untuk itu. Lebih jauh, masyarakat India masih membutuhkan format demokrasi yang tepat, karena demokrasi itu sendiri rumit. Bahkan demokrasi barat tidak bisa menghargai perempuan sebagaimana mestinya.

Masalah utama adalah di India adalah dominasi. Kekuatan ini memberi potensi untuk meraih kekuatan baru. Mereka yang menjadi pusat kekuasaan akan melanjutkan kekuatan potensial mereka atau, jika mereka menemukan penerusnya, maka mereka akan menemukan mereka yang mendukung minat mereka. Sehingga, pusat daya akan tetap sama. Sekarang, dalam teori tertentu, gender telah menjadi masalah psikologis laki-laki untuk mengendalikan kekuasaan. Setiap kekuatan yang ada ingin melanjutkan struktur kekuatannya. Tentang isu-isu gender terkait dengan program politik menjadi perhatian BJP dan BJP telah memberikan kesempatan partisipasi bagi perempuan dengan 33% suara melalui reservasi. Selain itu, setiap peringkat dalam struktur partai harus ada jumlah perempuan tertentu dalam posisi itu. Jadi, perempuan punya posisi dan BJP telah menerapkan kuota.

Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh BJP, dapat dilihat ada sejumlah laki-laki dan beberapa perempuan. Meski jumlahnya masih kurang, terutama di kalangan anak muda. Tapi setidaknya BJP memiliki sayap atau cabang perempuan di partainya Di sayap perempuan ini, 100% posisi dipimpin oleh perempuan. Organisasi ini juga memiliki banyak struktur dengan berbagai fungsi. Beberapa terkait dengan peran bendahara, beberapa perempuan menjadi sekretaris dan beberapa memimpin posisi lain. Sayangnya, kondisi seperti itu belum diterapkan di majelis tinggi majelis rendah India.

Salah satu subjek menyatakan bahwa di India setiap partai politik harus menjamin suara mereka untuk kepentingan perempuan, setidaknya 33%. Kenyataan menunjukkan bahwa masing-masing pihak hanya mencapai

sekitar 15 %, Meskipun setidaknya 33% dari tiket (awal pencalonan) harus perempuan. Tugas komisi pemilihan adalah untuk mengontrol konstitusi mengenai kuota bagi perempuan dalam partisipasi politik mereka. “Misalnya, buat peraturan bahwa jika partai Anda tidak dapat memenuhi 33% perempuan, Anda akan dihukum dalam pemilihan, atau komisi pemilihan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sebagai kandidat independen. Komisi pemilu memiliki kapasitas untuk mengendalikan partai politik”.

Hukum (regulasi) memaksa implementasi semangat ini untuk partisipasi perempuan namun siapa yang membuat hukum? Subjek penelitian dari BJP mempertanyakannya. Menurut Subjek dominasi itu bukan oleh laki-laki, tetapi dominasi itu oleh struktur kekuasaan. Ini bukan murni tentang laki-laki itu. Jadi, ini tentang kelas dominan siapa pun itu. Mereka adalah kelas penguasa dari struktur kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan kekuatan kelas penguasa itu. Biasanya, mereka mengklaim dengan strategi politik mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah demokrasi di India. Itulah sebabnya partai ini memiliki program pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat. Program-program semacam itu telah dilaksanakan secara rutin. Masyarakat dapat bergabung dengan program pendidikan politik ini.

Dalam BJP tidak ada pendidikan politik yang khusus berkaitan sensitivitas gender, seperti halnya di Indonesia yang ada adalah kaderisasi melalui rekrutmen keanggotaan partai politik.

Pendidikan Politik pada National Congress Party

Partai Kongres adalah partai sekuler yang mempertimbangkan program sosial liberal secara umum dengan ideologi kiri dalam politik India. Kebijakan sosial Kongres didasarkan pada prinsip Gandhi Sarvodaya - meningkatkan semua sektor masyarakat - yang melibatkan peningkatan kehidupan orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung dan terpinggirkan secara sosial.

Partai Kongres dengan suara bulat memutuskan untuk melembagakan kesetaraan sosial dan ekonomi bagi semua orang, tanpa memandang agama, kasta, jenis kelamin dan kelahiran (yang kemudian menjadi hak atas persamaan dan hak melawan eksploitasi dalam Konstitusi India). Selain itu, partai ini bermaksud untuk isu penghapusan ketidaksentuhan, agama dan toleransi sekuler (hak atas kebebasan beragama), dan perlindungan Hak Minoritas (tindakan afirmatif, hak budaya dan pendidikan minoritas), hak untuk berserikat, kebebasan berekspresi dari pemikiran, keunggulan universal untuk orang dewasa, pengembangan industri inklusif dan sosialisme.

Partai ini terutama mendukung liberalisme sosial yang berupaya menyeimbangkan kebebasan individu dengan keadilan sosial dan sekuler yang menegaskan hak untuk bebas dari norma-norma dan ajaran agama. Partai Kongres adalah partai dengan gerakan nasionalis modern pertama yang muncul di India. Selama gerakan independen, di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai muncul dan berkembang untuk membawa visi dan misinya.

Partai Kongres menjadi partai politik dominan di India. Pada 2015, dalam 15 pemilihan sejak kemerdekaan. Partai Kongres memenangkan mayoritas mutlak untuk enam kali dan memimpin koalisi yang berkuasa empat kali dan memimpin Pemerintah selama 49 tahun. Ada tujuh Perdana Menteri yang datang dari Kongres. Yang pertama adalah Jawaharlal Nehru (1947-1964), yang terakhir adalah Manmohan Singh (2004-2014).

Salah satu subjek penelitian anggota Lok Sabha menyatakan bahwa di India partisipasi perempuan dalam politik terkait dengan tradisi (dominan laki-laki) walaupun ada beberapa tokoh perempuan dalam politik India, seperti Sonia Gandhi hal itu bukanlah suatu produk dari sistem kesetaraan gender. Secara keseluruhan, kesempatan untuk bergabung dengan politik seperti itu terbuka untuk perempuan. Saat ini, ada lebih banyak perempuan yang melibatkan politik di India,

sehingga, partisipasi mereka dalam partai politik meningkat.

Namun, subjek ini menyatakan bahwa kesetaraan tidak benar-benar, karena masih ada dominasi laki-laki dalam politik India. Tetapi kesempatan perempuan di berbagai sektor publik lainnya lebih baik, karena ada banyak perempuan menjadi pekerja, pedagang, dll. Selain itu, partisipasi tertinggi perempuan dalam politik India adalah di tingkat *panchayat* (desa). Kembali ke dalam hal politik nasional, seperti apa yang terjadi di era Sonia Gandhi, tidak ada perubahan signifikan pada partisipasi perempuan di India. Pada saat itu misi untuk mengusulkan komisi perempuan di pemerintahan, bahkan dua kali lipat tidak berhasil, tidak ada dukungan dari partai-partai lain.

Partai Kongres memiliki program untuk kader atau pendukung seperti program pelatihan rutin, lokakarya, dan berkali-kali membahas masalah partisipasi perempuan. Mengapa masalah terjadi? Bagaimana mengatasi masalah serta pertanyaan tentang kendala yang dihadapi. Pelatihan yang dilakukan tidak rutin, tergantung kebutuhan. Dampak dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat tentang perlunya memperhatikan masalah gender dalam politik dan juga di ruang publik. Hal ini akan meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan, dalam berbagai masalah mereka memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi di parlemen sekarang, setidaknya ada 54 perempuan yang menjadi anggotanya bahkan ada juga departemen khusus mengenai masalah gender. Tetapi, di partai ini belum ada pendidikan politik yang khusus berbasis sensitivitas gender.

Muslim League dari partai Politik India (populer sebagai Liga Muslim), didirikan pada tahun-tahun awal abad kedua puluh oleh Kerajaan Inggris Raya Kekaisaran India. Pendukung kuat dari mayoritas yang terpisah untuk menjadi negara Muslim Pakistan memimpin dengan sukses, ke pembagian India Britania pada tahun 1947 oleh Kerajaan Inggris. Setelah pembagian dan pembentukan Pakistan,

Liga Muslim masih di bawah umur karena terus berlanjut di India dan liga ini sering menjadi bagian dari pemerintahan.

Muslim League adalah salah satu dari sedikit organisasi yang mempertahankan keberadaan Islam permanen di Parlemen India. Asosiasi Pemuda dan Serikat Mahasiswa Muslim disebut Persatuan Pelajar Muslim. Partai ini juga memiliki kebijakan liga-perempuan Muslimah. Di negara bagian Kerala, partai tersebut memiliki negara otonom *Thozhilali Union yang terpisah* (STU, Serikat Pekerja Independen), dan Serikat Petani Swathanthra Karshaka Sangam, (Serikat Petani Independen), sebuah forum untuk pengacara dan pengacara simpatisan.

Salah satu subjek penelitian dari liga ini adalah seorang ulama *Muslim Hind*. Dia mengatakan bahwa organisasinya fokus pada pluralisme, demokrasi, dan keberadaan Islam di India, termasuk juga sudut pandang tasawuf. Mengenai masalah gender, dia mengatakan bahwa "Itu tergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan perempuan harus didasarkan pada Alquran, dan inilah yang menjadi fokus kami". Partai ini percaya bahwa Islam sangat menghormati keberadaan perempuan.

Pandangan partai menganggap bahwa Khadijah adalah profil ideal seorang perempuan dalam masyarakat Islam. Khadijah adalah sosok perempuan yang berdaya memiliki bisnis dan juga menjadi orang yang berpendidikan. Dalam hal keadilan gender di India, partisipasi dan keberadaan perempuan cukup kuat, bahkan memiliki pengalaman yang dipimpin oleh perempuan, Indira Gandhi. Para perempuan juga mewakili keberadaan mereka di berbagai sektor, memiliki hak untuk mengekspos keberadaan mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Di India, pendidikan adalah kunci terpenting dalam mengubah kehidupan sosial ekonomi. Dengan akses pendidikan yang baik akan membawa perempuan India ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik pula (Norwi, 2017). Hal ini sejalan dengan temuan (Suguna,

2011) bahwa pendidikan perempuan di India memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan setengah dari sumber daya manusia, tetapi dalam meningkatkan kualitas hidup di sektor domestik dan publik. Perempuan yang berpendidikan tidak hanya cenderung mempromosikan pendidikan anak perempuan mereka, tetapi juga dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk semua anak mereka kelak.

Partai ini memiliki organisasi sayap perempuan di seluruh negara bagian hal ini dapat dilihat atas partisipasi tinggi dalam sayap perempuan di organisasinya. Organisasi sayap ini juga mendirikan beberapa madrasah terutama bagi perempuan untuk memberikan kesempatan yang lebih signifikan bagi mereka yang ingin berpartisipasi aktif dalam urusan publik.

Organisasi ini memiliki cabang di seluruh negara di semua negara bagian. Dalam pertemuan besar para Sufi di India, liga ini juga memiliki forum khusus untuk perempuan. Organisasi ini memiliki beberapa program untuk mendukung sayap perempuan untuk membahas masalah-masalah perempuan di India, serta bagaimana perempuan Muslim harus bertahan hidup dalam hal ini. kehidupan modern serta dapat mengakses pendidikan modern.

Dari uraian di atas *Muslim League* telah memiliki organisasi sayap perempuan namun sama dengan ketiga partai politik di Indonesia yang menjadi subjek penelitian ini menyatakan bahwa organisasi sayap belum mempunyai model pendidikan politik yang berdasarkan sensitivitas gender.

Dari studi atas keenam partai politik tersebut di atas dapat dikatakan bahwa negara belum dapat mewujudkan perubahan yang signifikan terhadap dominasi laki-laki atas perempuan di ranah politik. Sebenarnya Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan dengan konsekuensi pemerintah Indonesia harus melaksanakan setiap pasal yang tertera dalam konvensi tersebut, seperti hak politik perempuan yang integral dengan hak azasi manusia dan hak azasi manusia adalah aspek yang mendasar dari

kerangka kerja demokratis (Hardjaloka, 2012). Realitas ini menggambarkan bahwa hak politik perempuan masih semu masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi seperti ini biasanya dibungkus oleh nilai-nilai sosial, norma hukum, simbol agama dan budaya.

Ternyata, kondisi di India tidak lebih baik dari Indonesia, temuan dalam studi ini mendukung temuan (Kurniaty, 2015). bahwa representasi perempuan dalam parlemen meskipun penting sebagai dasar keadilan sosial dan legitimasi sistem politik ternyata sulit untuk diimplementasikan ke dalam peningkatan representasi berbagai kepentingan perempuan.

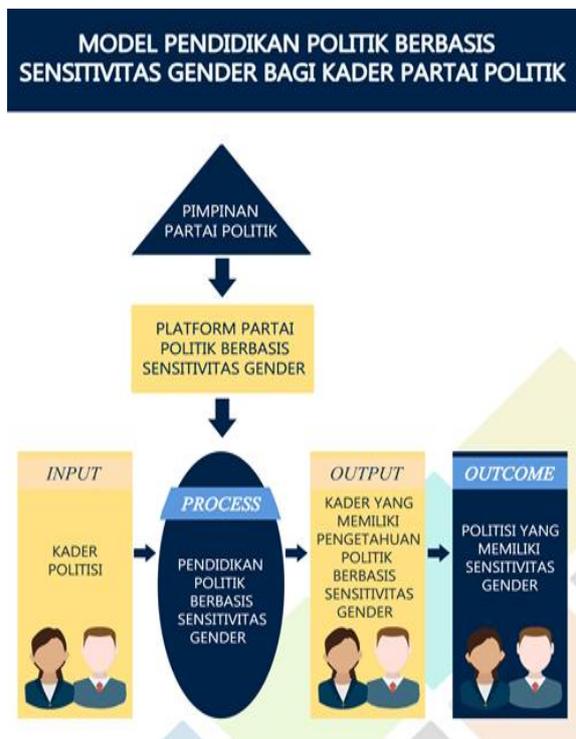
Selain itu pengetahuan politik dari para pemilih (*voters*) juga turut mempengaruhi terpilihnya politisi perempuan di parlemen. Hal ini dinyatakan dalam studi Prihatini (2018) berkenaan dengan stereotip gender sebagai isyarat dalam memilih kandidat legislatif, penelitian ini menegaskan kembali bahwa dalam masyarakat yang kurang informasi, pemilih cenderung memilih laki-laki daripada kandidat perempuan. Pilihan ini sangat didasarkan pada keyakinan politik responden bahwa laki-laki memiliki yang lebih baik kualitas kepemimpinan daripada perempuan. Gambaran ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Margret., 2019) bahwa perempuan dukungannya hanya dianggap pelengkap saja tidak menjadi prioritas dalam pemilihan umum.

Walaupun demikian beberapa kebijakan digunakan untuk mendukung hal tersebut hal ini sejalan dengan (Lestari, H., & Sigirow, 2019) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa kuota untuk calon legislatif perempuan dianjurkan 30% perlahan sudah mulai meningkat dari beberapa tahun sebelumnya. Keterlibatan perempuan pun semakin terlihat baik dari pusat dan daerah.

Bagaimanapun juga pendidikan dalam partai politik itu penting. Hal ini sejalan dengan studi Septiawan et. al (2017) bahwa pendidikan politik memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat untuk memahami politik dan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Hal ini dibuktikan adanya strategi yang efektif

untuk membina kader partai politik Golkar adalah melalui pendidikan politik.

Dari hasil komparasi antara pendidikan politik pada tiga partai politik di Indonesia dan tiga partai politik di India dapat diformulasikan bahwa model pendidikan politik yang dapat diterapkan adalah model dengan skema di bawah ini :



Gambar 1. Skema Model Pendidikan Politik Berbasis Sensitifitas Gender bagi kader Partai Politik

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah)

PENUTUP

Dari studi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *sensitivitas gender* dalam partai politik di Indonesia maupun di India belum kuat. karena pendidikan politik di dalam partai politik tidak didasarkan pada perlunya pembahasan isu gender khususnya kepentingan perempuan. Keenam partai politik PDIP, Partai Golkar dan PKS di Indonesia dan BJP, Partai Kongres dan Muslim League masing-masing memiliki modelnya sendiri dan lebih dekat dengan model kaderisasi.

Penyebab dari tidak adanya pendidikan politik berbasis sensitivitas gender karena kurangnya dukungan dan komitmen partai politik dalam memprogramkan kegiatan ini. Hal

ini masih diwarnai oleh kekuatan kultur yang masih memandang ranah politik adalah ranah publik yang lebih pantas diisi oleh peran laki-laki.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirullah, A. (2016). *Pendidikan Politik Perempuan*. VII(Visipena Journal, 7(1).), 104–127.
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>
- Choudhury, S., & Slaby, J. (Eds.). (2016). *Critical neuroscience: A handbook of the social and cultural contexts of neuroscience*. John Wiley & Sons.
- Gerintya, S. (2017). *Periksa Data: Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*. Retrieved from tirto.id
- Hadiyono, V. (2015). MEMAKNAI PEREMPUAN DALAM KURSI PARLEMEN. *KISI HUKUM*.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(15), 28.
- Haryati, E. (2017). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara*. 19.
- Huberman, A., & Miles, M. (2012). Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*. <https://doi.org/10.4135/9781412986274.n2>
- Kurniaty, E. Y. (2015). Affirmative Action : Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(2), 187–196.
- Lestari, H., & Sigiro, A. N. (2019). Women's and Health Officer's Knowledge on Access to Reproductive and Sexual Health Services Covered by the National Health Insurance: Surveys in 15 Districts-Cities in Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24, 259–273.
- Margret., A. (2019). Two Decades of

- Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda. *JURNAL PEREMPUAN*, 24(2), 89-100., 24(2), 89-100.
- Meiji, N. (2016). Pendidikan Politik dalam Kuasa Simbolik: Kajian mengenai Dinamika Politik Anak Muda yang Tergabung dalam Partai Politik di Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 103-116. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/2459>
- Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., & Nielsen, R. (2019). *Reuters Institute digital news report 2019*. (Reuters Institute for the Study of Journalism.).
- Norwi, P. P. (2017). *IMPLEMENTASI PROGRAM COOPERATIVE AND ASSISTANCE FOR*. 4(1), 1-14.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Prihatini, E. S. (2018). Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament. *Women's Studies International Forum*, 70 (June 2018), 46-52. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.015>
- R., G., & G., S. (2018). Promoting Gender Equality through Education in India. In *Gender Parity and Women Empowerment—Challenges and Way Forward*. <https://doi.org/10.9756/bp2018.1012/06>
- Septiawan, I., Winarno, W., & Wijianto, W. (2017). Strategi Kader Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Terhadap Kader Partai Golkar Kabupaten Sragen). *Educitizen*, 2(1), 242058.
- Strulik, S. (2007). LOCAL GOVERNANCE AND WOMEN'S QUOTA RESERVATIONS IN INDIA: AGAINST THE NOTION OF PROXIES. *Pakistan Journal of Women's Studies*.
- Suguna, M. (2011). Education and Women Empowerment in India. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 15(6), 198-204. <https://doi.org/10.29070/15/57678>
- Vijayakumari, R., & Rao, K. G. (2014). *Social Science Women's Political Participation in India Dept . of Computer Science and Engg ., Acharya Nagarjuna University , Guntur , India*. (8), 1-5.